



---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013 ini merupakan gambaran berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Laporan ini dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan masukan serta pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kerangka melaksanakan 26 urusan wajib 8 urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembangunan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku, sehingga orientasi pembangunan bersifat pemberdayaan terhadap manusianya (*people centered development*). Program pembangunan yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat bertujuan supaya masyarakat dapat mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang luas dalam menentukan kehidupannya. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi yang memadai bagi upaya tersebut dengan mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap pemangku kepentingan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan.



Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Nilai IPM Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM Kabupaten Sleman terakhir sebesar 79,39 menduduki peringkat 13 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Target IPM Kabupaten Sleman di akhir tahun penyelenggaraan RPJM pada tahun 2015 adalah sebesar 80 point.

**Tabel 4.1. Indikator IPM Kabupaten Sleman 2010 - 2012**

No	Uraian	2010	2011	2012*
<b>Komponen IPM</b>				
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,06	75,18	75,29
2.	Angka Melek Huruf (%)	92,61	93,44	94,53
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,30	10,51	10,52
4.	Konsumsi riil per kapita (Rp000)	647,84	650,27	654,11
<b>Indikator IPM</b>				
1.	Kesehatan	83,43	83,63	83,82
2.	Pendidikan	84,63	85,65	86,40
3.	Pendapatan	66,52	67,08	67,97
<b>IPM</b>		<b>77,70</b>	<b>78,79</b>	<b>79,39</b>
	Reduksi Shortfall	2,21	2,71	2,84

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (\*Angka Sementara)

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2010–2015, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2013, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013, maka berbagai kebijakan tersebut difokuskan pada berbagai prioritas pembangunan.

Sasaran dan pencapaian sasaran masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**A. Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja**

1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer sebesar 2,71% terealisasi sebesar 2,02%
2. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder sebesar 5,48% terealisasi sebesar 4,87%
3. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier sebesar 6,63% terealisasi sebesar 7,02%
4. Pertumbuhan nilai penanaman modal 4,27 % terealisasi sebesar 30,52%

**B. Penanggulangan Kemiskinan**

1. Penduduk bekerja dari angkatan kerja 94,67% terealisasi sebesar 93,53%
2. Tingkat Pengangguran terbuka 6,8 % terealisasi sebesar 6,47%
3. Angka kemiskinan 17% terealisasi sebesar 13,89%
4. PDRB per Kapita (ADHB) Rp13.417.000,00 terealisasi sebesar Rp16.370.000,00
5. Angka Gini Ratio 0,30 terealisasi 0,44
6. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS pada 73 lembaga terealisasi 104 lembaga
7. Sumber potensi kesejahteraan sosial pada 86 karang taruna dan 460 pekerja sosial masyarakat terealisasi pada 86 karang taruna dan 542 pekerja sosial masyarakat



8. Usaha-usaha rehabilitasi dan cakupan-cakupan pelayanan sosial bagi :
  - a. Wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 35% terealisasi 2,5%
  - b. Balita terlantar sebanyak 25% terealisasi 0,9%
  - c. Lansia terlantar sebanyak 35% terealisasi 4,43%
  - d. Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial sebanyak 72 %
9. Laju pertumbuhan sebesar 1,59 % terealisasi sebesar 1,38%.
10. Pasangan Usia Subur (PUS) sasaran peserta KB aktif sebesar 1,75% terealisasi 14,45%
11. KB Pria sebesar 8,36 % terealisasi sebesar 7,86%.
12. KB Mandiri sebesar 61,81 % terealisasi sebesar 68,82%.

**C. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik**

1. Aparat berpendidikan S1 sebanyak 39,71% terealisasi 54,12%
2. Kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 0,26 % terealisasi 0,17%
3. Pejabat yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan sebanyak 95% terealisasi 91,93%
4. Aparat yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sebanyak 17,25% terealisasi 18,18%
5. Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi sebanyak 39% terealisasi 84,22%
6. Tk. Pencapaian program/kegiatan 91% terealisasi sebesar 99,5%
7. Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP 100%
8. SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik 60% terealisasi 60,42%
9. Penyediaan informasi publik 10 jenis terealisasi sebesar 10 jenis
10. Jenis informasi yang disajikan 4 jenis terealisasi sebesar 4 jenis
11. SOP mekanisme pengaduan 2 aturan terealisasi sebesar 1 aturan
12. Indeks Kepuasan Masyarakat 79 terealisasi 78,65
13. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD sebanyak 5 temuan terealisasi 0 temuan
14. Banyaknya kerjasama efektif sebanyak 70% terealisasi 94,64%
15. Penduduk wajib ber KTP sebanyak 96% terealisasi 97,79%



16. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan sebanyak 94% terealisasi 131,25%
17. Rasio swadaya masyarakat 1:7,6 terealisasi 1:1,28
18. Kasus tertangani 100% terealisasi 100%
19. Jumlah pelanggaran perda sebanyak 574 kasus terealisasi 608 ditindaklanjuti seluruhnya
20. Penyelesaian kasus pelanggaran hukum 100% terealisasi 100%
21. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres, pileg, pilgub, pilkada, pilkades, pilduk sebanyak 71% terealisasi 77,12%
22. Jumlah orsospol sebanyak 38 partai terealisasi 15 partai
23. Jumlah ormas aktif sebanyak 67 ormas terealisasi 68 ormas
24. Angka kejadian pelanggaran HAM sebanyak 5 kejadian terealisasi 0 kejadian
25. Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD sebanyak 80% terealisasi 71%
26. Fasilitasi kelompok seni sebanyak 8,40% terealisasi 10,64%
27. Pelestarian nilai-nilai tradisi sebanyak 40% terealisasi 56,25 %
28. Pelestarian warisan budaya sebanyak 25% terealisasi 22,24%
29. Kelompok kesenian perempuan sebanyak 4 jenis terealisasi 5 jenis

#### **D. Menjaga kualitas kesehatan**

1. Angka Harapan Hidup 74,76 tahun dapat teralisasi 76,10
2. Angka Kematian Bayi 4,08 per 1.000 KH, terealisasi sebesar 4,60 per 1.000 KH
3. Angka Kematian Balita <2 per 1000 KH, terealisasi 0,35/1000 KH
4. Angka Kematian Ibu <69,31 per 100.000 KH, terealisasi 63,70 per 100.000 KH
5. Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +85,00%, teralisasi 86,67%
6. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk 52%, teralisasi 69,47% per 100.000 penduduk
7. Prevalensi HIV <0,5, terealisasi 0,05%
8. Persentase Balita dengan Gizi buruk 0,52%, teralisasi 0,37%



9. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 53%, terealisasi 72,01%

**E. Menjaga kualitas Pendidikan;**

1. Angka melek huruf 92,46%, tercapai 98,03%
2. Rata-rata lama sekolah 10,14 tahun, terealisasi 10,52
3. Rata-rata APK SD 115,88%, tercapai 116,53%
4. Rata-rata APK SMP 115,90%, terealisasi 109,76%
5. Rata-rata APK SMA/SMK 75,80%, terealisasi 77,71%
6. Rata-rata APM SD 99,18%, terealisasi 101,49%
7. Rata-rata APM SMP 81,06%, terealisasi 81,86%
8. Rata-rata APM SMA/SMK 53,95%, terealisasi 54,26%
9. Kelayakan guru mengajar SD 55%, terealisasi 75,48%, SMP 85% terealisasi 85,89%, dan SMA/SMK 92% terealisasi 91,26%
10. Meningkatnya minat baca masyarakat 32%, terealisasi 12,87%
11. Prestasi siswa akademik 9 prestasi terealisasi 15 dan non akademik 29 prestasi terealisasi 43
12. Presentase ormas kepemudaan yang aktif sebanyak 83% terealisasi 85,71%
13. Prestasi olahraga tingkat provinsi meraih rangking 2 terealisasi rangking 3

**F. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

1. Kondisi jalan dan jembatan baik 33,5 % terealisasi 64,7%
2. Kondisi irigasi baik 76,5% terealisasi 81,74%
3. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik 76% terealisasi 77%
4. SKPD melaksanakan e-gov di 25 instansi
5. Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik 39% terealisasi 57,57%
6. Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik 16,2% terealisasi 34,09%
7. Ketersedian prasarana dan sarana sekolah 79,4% terealisasi 103,62%
8. Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 76,5% terealisasi 104,90%
9. Kondisi sarana dan prasarana olahraga baik 83% terealisasi 80,00%
10. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan baik 68% terealisasi 76,29%
11. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan baik 54% terealisasi 68,32%



#### **G. Menjaga stabilitas ketahanan pangan;**

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian sebesar 3,54% terealisasi 2,03%

#### **H. Menjaga Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Luas lahan kritis 550 ha terealisasi 471,1 ha
2. Luas lahan rusak akibat penambangan 170 ha terealisasi 170 ha
3. Luas hutan 6.050 ha terealisasi 6.148,9ha
4. Rata-rata penurunan air tanah <40 cm terealisasi <40 cm
5. Alih fungsi lahan pertanian 0,24% terealisasi 0,26%
6. Tertib pemanfaatan tanah 86% terealisasi 77,5%
7. Tertib administrasi pertanahan 60% terealisasi 81,04%
8. RTH perkotaan >30% terealisasi 54,71%
9. Cakupan RDTR 86% terealisasi 88,23%
10. Kualitas udara <AB terealisasi <AB
11. Status mutu air sungai -11 s/d -30 terealisasi -25 s/d - 29
12. Kualitas lahan/tanah <AB terealisasi <AB
13. Usaha yang memiliki IPAL 84% terealisasi 88,46%
14. Usaha yang memiliki dokumen lingkungan 99,10% terealisasi 98,79%
15. Energi terbarukan terbangun 330 unit terealisasi 366 unit
16. Elektrifikasi 95,50% terealisasi 99,25%

#### **I. Pengelolaan Bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana;**

1. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2.510 orang terealisasi 3.263 orang
2. Regulasi penanggulangan bencana 4 regulasi terealisasi 5 regulasi
3. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 20,06% terealisasi 27,71%
4. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik 45% terealisasi 50,4%
5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 30% terealisasi 18,04% dan *response time rate* daerah layanan Wilayah Bencana Kebakaran (WMK) 75% terealisasi 100%

**J. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;**

1. Menurunnya konflik di masyarakat 45 kasus, terealisasi 5 kasus
2. Konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) < 6 kasus, terealisasi 1 kasus

**K. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan;**

1. Penyelesaian kasus anak korban kekerasan 10%, terealisasi 100%
2. Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan 5%, terealisasi 100%
3. Lembaga PUG yang aktif 60%, terealisasi 75%
4. Data terpilah 31 SKPD, terealisasi 31SKPD
5. Perempuan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan monev pembangunan 31%, terealisasi 28,19%
6. Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja 45,05%, terealisasi 42,14%

Dari keseluruhan prioritas dan indikator tersebut rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Sleman pada tahun 2013 secara umum berjalan dengan baik. Hal demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 berjalan dengan baik. Hal ini pula menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya komitmen tinggi para pemangku kepentingan kunci di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan prima, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan, pengelolaan sarana dan prasarana serta sumber daya alam dan lingkungan yang baik, serta meningkatkan kesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman
2. SKPD pengampu program, kegiatan dan indikator kinerja di dalam RPJMD Kabupaten mempunyai komitmen yang utuh dan kuat dalam upaya pencapaian target.
3. Terjalin hubungan kinerja yang baik, sinergis dan jejaring antar SKPD yang terjalin dengan baik sehingga target RPJMD Kabupaten dapat tercapai.





4. Anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat dan terarah demi terlaksananya program/kegiatan prioritas.
5. Sistem perencanaan pembangunan yang dibangun secara *top down* maupun *bottom up* telah mampu mengakomodasi secara luas kepentingan-kepentingan *stakeholder* sehingga pembangunan dapat berjalan baik.

Namun demikian masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sleman pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masa yang akan datang.

Untuk itu sesuai dengan kewenangannya, melalui berbagai program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penerapan penyelenggaraan pemerintah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan komitmen yang tinggi dan peningkatan kinerja dari seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sleman diharapkan visi dan misi Kabupaten Sleman yaitu keadaan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera di tahun 2015 akan dapat terwujud.